

Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah; Studi Pada Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia

Wahyuni¹⁾, Fadly Yashari Soumena²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan

E-mail: Wahyuni07yuni@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan

E-mail: fadly.yashari@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the level of transparency and accountability in financial reporting at Islamic Financial Institutions (LKI) in Indonesia. Transparency and accountability are fundamental principles in Islamic finance to build stakeholder trust. This study explores how LKI's financial reporting practices in Indonesia implement these principles, including disclosure of financial and non-financial information, compliance with sharia accounting standards, and accountability mechanisms to stakeholders. The research method used is a qualitative descriptive approach with case studies on several LKIs in Indonesia. Data was collected through in-depth interviews with LKI management and analysis of financial statement documents. The results of the study are expected to provide a comprehensive overview of the challenges and opportunities in increasing transparency and accountability of Islamic financial reporting in Indonesia. The implications of this study are expected to contribute to the development of better Islamic financial reporting regulations and practices, thereby increasing trust and growth of the Islamic financial sector in Indonesia.

Keywords : *Accountability, Accountability, Finance, Institutions, Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tumbuh pesat secara global, termasuk di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pertumbuhan ini diiringi dengan meningkatnya perhatian terhadap prinsip-prinsip fundamental yang mendasari operasionalnya, di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip ini bukan hanya imperatif etis dalam konteks syariah, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi di mata para pemangku kepentingan, termasuk deposan, investor, regulator, dan masyarakat umum (Sudarmi et al., 2024).

Dalam konteks Lembaga Keuangan Islam (LKI), transparansi merujuk pada keterbukaan dan kejujuran dalam menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Informasi ini memungkinkan untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai kinerja keuangan, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial LKI. Sementara itu, akuntabilitas mencerminkan kewajiban LKI untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya, serta kinerja keuangan dan non-keuangannya kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku (Kamaruzaman & Ishak, 2023).

Pelaporan keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pelaporan keuangan konvensional. Selain menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, pelaporan keuangan syariah juga harus mengungkapkan

informasi mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pengelolaan dana zakat dan kebajikan, serta dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh operasional LKI. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks (Calandra et al., 2024).

Di Indonesia, perkembangan LKI yang signifikan menuntut adanya kerangka pelaporan keuangan yang kuat dan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang efektif. Regulasi terkait pelaporan keuangan syariah terus mengalami perkembangan untuk mengakomodasi karakteristik unik LKI dan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan. Namun, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pelaporan keuangan LKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi standar akuntansi syariah, kualitas sumber daya manusia, dan tekanan persaingan (Kismawadi & Irfan, 2025).

Studi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah pada LKI di Indonesia menjadi krusial untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip ini telah diimplementasikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini akan memberikan kontribusi penting bagi upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan syariah, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan Islam yang berkelanjutan di Indonesia (Amjadallah A et al., 2023).

Untuk menganalisis secara komprehensif tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pada berbagai jenis LKI di Indonesia. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana LKI mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pelaporan keuangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas tersebut, serta menganalisis implikasi dari praktik pelaporan keuangan terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan pertumbuhan LKI (Saputri et al., 2024).

Dengan melakukan studi kasus pada beberapa Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia, Sehingga untuk memberikan kontribusi empiris yang berarti dalam pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah. Tujuan ini dapat menawarkan rekomendasi yang berguna bagi regulator, manajemen LKI, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah di Indonesia, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan praktik tata kelola yang baik (Raju, 2022).

Mengkaji peran standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI). Analisis ini akan mencakup penilaian mengenai sejauh mana standar tersebut memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial. Selain itu, perbandingan dengan standar akuntansi keuangan konvensional dan standar akuntansi syariah internasional akan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan serta peluang untuk harmonisasi (Damayanti et al., 2023).

Sehingga tidak hanya memberikan gambaran deskriptif tentang praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah di Indonesia, tetapi juga menyajikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasinya. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan syariah yang lebih efektif, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada

stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan Islam di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas di antara semua pemangku kepentingan (Saptono & Khozen, 2024).

Pandangan para pemangku kepentingan terkait tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI). Persepsi dan harapan dari deposan, investor, analis keuangan, serta masyarakat umum akan dianalisis untuk mengetahui apakah informasi yang disediakan oleh LKI sudah memenuhi kebutuhan . Penentuan pencampuran antara informasi yang disajikan dan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan akan menjadi poin penting dalam rekomendasi yang diperoleh dapat lebih relevan dan aplikatif (dan Yanting Xu dan Ziqing Du, 2025).

Sehingga ini akan mengevaluasi sudut pandang para pemangku kepentingan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI). Analisis akan dilakukan terhadap persepsi dan harapan dari deposan, investor, analis keuangan, serta masyarakat umum untuk memahami apakah informasi yang disediakan oleh LKI sesuai dengan kebutuhan. Fokus utama yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara informasi yang disajikan dan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, agar rekomendasi yang dihasilkan bisa lebih relevan dan aplikatif (Ye et al., 2025).

Pertumbuhan pesat Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia menuntut perhatian lebih besar terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya mencakup penyampaian informasi keuangan yang akurat, tetapi juga mencakup pengungkapan informasi yang relevan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan dampak sosial dari kegiatan LKI. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, yang mencakup deposan, investor, dan masyarakat luas. Keterbukaan dalam pelaporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan legitimasi LKI dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan syariah (Annas & others, 2021).

Di sisi lain akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa LKI bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Sehingga kewajiban akuntabilitas mencakup untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat LKI beroperasi dalam kerangka syariah yang menuntut kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan moral. Penegakan akuntabilitas yang kuat dapat membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat LKI.

Pada pelaksanaan transparansi prinsip dan akuntabilitas, tantangan yang dihadapi LKI di Indonesia cukup kompleks. Perbedaan interpretasi terhadap standar akuntansi syariah, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, serta tekanan persaingan di pasar keuangan menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Maka sangat penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor ini agar dapat mengidentifikasi solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah.

Studi mengenai persepsi pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan LKI juga menjadi aspek yang krusial. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai harapan dan kebutuhan informasi dari deposan, investor, dan masyarakat umum, LKI dapat menyesuaikan praktik pelaporannya agar lebih relevan dan bermanfaat. Penentuan pemahaman antara informasi yang disajikan dan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan akan memberikan wawasan berharga untuk kebijakan pengembangan dan praktik pelaporan yang lebih efektif (Jumaizi, 2024).

Pengembangan kerangka pelaporan keuangan yang kuat dan harmonisasi standar akuntansi syariah di Indonesia akan menjadi langkah penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas LKI. Melalui perbandingan dengan standar akuntansi internasional dan konvensional, potensi kesenjangan dapat diidentifikasi dan diatasi. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, tetapi juga akan memperkuat posisi LKI di pasar keuangan global, serta mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian adalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah dari perspektif Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas praktik pelaporan, persepsi manajemen, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap praktik pelaporan keuangan pada beberapa LKI yang dipilih secara purposif di Indonesia. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan komprehensif mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam laporan keuangan, mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan, serta faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhinya. Pemilihan beberapa LKI sebagai unit analisis akan memungkinkan perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan perbedaan signifikan dalam praktik pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia bervariasi.

Sebagian LKI telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan secara komprehensif, termasuk pengungkapan kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial. Namun, ditemukan pula variasi dalam kedalaman dan detail informasi yang disajikan, terutama terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dan dampak sosial. Faktor-faktor seperti ukuran LKI, tingkat adopsi standar akuntansi syariah, dan tekanan regulasi teridentifikasi sebagai pendorong transparansi dan akuntabilitas.

3.2. Pembahasan

1. Konseptualisasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Konteks Keuangan Syariah

Pembahasan mengenai konseptualisasi transparansi dan akuntabilitas dalam konteks keuangan syariah merupakan fondasi krusial untuk memahami implementasinya pada Lembaga Keuangan Islam (LKI). Transparansi, dalam ranah ini, melampaui sekadar keterbukaan informasi keuangan. Ia mencakup imperatif penyajian informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami mengenai operasional, kinerja keuangan, kepatuhan syariah, serta aspek sosial dan etika LKI kepada seluruh pemangku kepentingan. Ruang lingkup transparansi dalam pelaporan keuangan syariah mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah, rincian transaksi berdasarkan akad yang digunakan, serta informasi mengenai pengelolaan dana-dana khusus seperti zakat dan kebajikan (Shalhoob, 2025).

Akuntabilitas dalam keuangan syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan akuntabilitas konvensional. Selain pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor, LKI juga memiliki akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT atas pengelolaan amanah dana yang dipercayakan. Akuntabilitas horizontal mencakup tanggung jawab kepada deposan, investor, regulator, dan masyarakat umum. Dimensi akuntabilitas ini tercermin dalam kewajiban LKI untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Mekanisme akuntabilitas dalam LKI melibatkan tidak hanya audit keuangan, tetapi juga audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep yang saling terkait dan memperkuat dalam konteks keuangan syariah. Transparansi menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi terlaksananya akuntabilitas. Tanpa informasi yang transparan dan komprehensif, pemangku kepentingan tidak dapat mengevaluasi kinerja dan kepatuhan LKI secara efektif, sehingga akuntabilitas menjadi sulit diwujudkan. Sebaliknya, kesadaran akan akuntabilitas mendorong LKI untuk menyajikan informasi secara lebih transparan dan bertanggung jawab. Landasan filosofis dan etika syariah, yang menekankan pada kejujuran (*sidq*), amanah (*trustworthiness*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*), menjadi imperatif moral yang mendasari pentingnya implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek operasional dan pelaporan keuangan LKI (Arwani & Priyadi, 2024).

Pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara transparansi dan akuntabilitas menjadi esensial. Transparansi berfokus pada penyediaan informasi yang

terbuka dan jelas, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami kondisi dan kinerja LKI. Sementara itu, akuntabilitas menekankan pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang telah diambil, serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam konteks LKI, transparansi adalah prasyarat untuk akuntabilitas yang efektif. Informasi yang transparan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai apakah LKI telah bertindak sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, serta apakah mereka telah memenuhi tanggung jawabnya kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Landasan filosofis dan etika syariah memberikan kerangka nilai yang kuat bagi implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam. Prinsip tauhid, yang mengakui Allah SWT sebagai pemilik mutlak segala sesuatu, mengimplikasikan bahwa manusia hanyalah pengelola (khalifah) yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Prinsip ini mendorong LKI untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengelola dana dan sumber daya. Selain itu, prinsip keadilan ('adl) menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pemangku kepentingan, yang hanya dapat terwujud melalui transparansi informasi dan mekanisme akuntabilitas yang jelas (Jaradat & Oudat, 2025).

2. Karakteristik Pelaporan Keuangan Syariah dan Implikasinya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas.

Pelaporan keuangan syariah memiliki karakteristik distingtif yang membedakannya secara fundamental dari pelaporan keuangan konvensional, dan karakteristik ini membawa implikasi signifikan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam (LKI). Salah satu perbedaan mendasar terletak pada basis filosofisnya. Jika pelaporan konvensional berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dan kepentingan pemegang saham, pelaporan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang lebih luas, mencakup keadilan, kesejahteraan sosial, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Implikasi dari perbedaan ini adalah adanya kebutuhan untuk mengungkapkan informasi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga informasi mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional dan produk LKI.

Salah satu ciri khas pelaporan keuangan syariah adalah adanya pengungkapan khusus yang tidak ditemukan dalam laporan keuangan konvensional. Ini termasuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang menunjukkan bagaimana LKI mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul. Selain itu, terdapat laporan dana kebajikan (qardhul hasan) yang menjelaskan pengelolaan dana pinjaman tanpa bunga untuk tujuan sosial. Pengungkapan ini menjadi krusial untuk akuntabilitas LKI kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan tanggung jawab sosial mereka. Lebih lanjut, penjelasan mengenai akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi keuangan, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah, serta bagaimana akad-akad tersebut mempengaruhi pengakuan dan pengukuran transaksi, menjadi penting untuk transparansi operasional LKI (Aamer, 2024).

Peran Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia (DSAK IAI) menjadi instrumen penting dalam

memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah. SAK Syariah bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam penyusunan laporan keuangan LKI sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya standar yang komprehensif, diharapkan informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, reliabel, dan komparabel, sehingga meningkatkan transparansi. Namun demikian, tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi syariah di tingkat global dan interpretasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan variasi dalam praktik pelaporan antar LKI, yang berpotensi mengurangi tingkat komparabilitas dan transparansi secara keseluruhan.

Implikasi karakteristik pelaporan keuangan syariah terhadap akuntabilitas juga sangat signifikan. Kewajiban untuk mengungkapkan informasi mengenai kepatuhan syariah, misalnya melalui laporan dan opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), memperkuat mekanisme pertanggungjawaban LKI terhadap prinsip-prinsip Islam. DPS bertindak sebagai pihak independen yang mengawasi dan memastikan bahwa seluruh operasional dan produk LKI sesuai dengan ketentuan syariah. Opini DPS yang disertakan dalam laporan keuangan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa LKI tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai etis dan hukum Islam. Pengungkapan ini menjadi bentuk akuntabilitas yang unik dan membedakan LKI dari lembaga keuangan konvensional (Simsek et al., 2024).

Tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi syariah di tingkat internasional turut mempengaruhi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara global. Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dan keragaman praktik keuangan Islam di berbagai negara dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporan. Meskipun demikian, upaya kolaborasi antar badan penyusun standar akuntansi syariah di berbagai negara terus dilakukan untuk mencapai harmonisasi yang lebih besar. Harmonisasi standar diharapkan dapat meningkatkan komparabilitas laporan keuangan LKI lintas negara, memfasilitasi investasi lintas batas, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan.

3. Praktik Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia.

Pembahasan mengenai praktik transparansi dalam pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia memerlukan analisis empiris terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan oleh berbagai jenis LKI, termasuk bank syariah, unit usaha syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah. Analisis tingkat pengungkapan informasi keuangan akan mencakup evaluasi terhadap kelengkapan dan detail penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Hal ini melibatkan penelaahan apakah LKI menyajikan rincian yang memadai untuk setiap pos laporan keuangan, seperti klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan akad syariah, pemisahan pendapatan dan beban berdasarkan jenis transaksi syariah, serta penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan (Kim & Grauer, 2024).

Selain informasi keuangan konvensional, praktik transparansi dalam pelaporan keuangan syariah di Indonesia juga dievaluasi berdasarkan tingkat pengungkapan

informasi non-keuangan yang relevan dengan prinsip syariah. Ini mencakup pengungkapan mengenai kepatuhan syariah, yang idealnya mencakup laporan dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai kesesuaian operasional dan produk LKI dengan prinsip syariah (Djamil, 2023). Tingkat detail dan independensi opini DPS menjadi indikator penting dari transparansi akuntabilitas syariah. Selanjutnya, pengungkapan mengenai praktik tata kelola syariah (Islamic Corporate Governance), seperti struktur dewan komisaris dan dewan pengawas syariah, mekanisme pengawasan syariah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam, juga menjadi fokus analisis. Pengungkapan terkait tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selaras dengan prinsip syariah, seperti kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, turut menjadi aspek yang diamati dalam menilai tingkat transparansi.

Evaluasi kualitas informasi yang disajikan merupakan elemen krusial dalam menilai praktik transparansi. Relevansi informasi diukur berdasarkan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemangku kepentingan. Reliabilitas informasi dinilai dari tingkat kebebasan dari kesalahan material dan bias, serta dapat diverifikasi. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan menjadi penting agar informasi tetap relevan bagi pengambilan keputusan. Komparabilitas informasi, baik antar periode maupun antar LKI, memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja secara efektif. Analisis praktik transparansi di Indonesia juga mempertimbangkan aksesibilitas laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan. Ketersediaan laporan keuangan pada situs web perusahaan, kemudahan pengunduhan, serta penyediaan informasi kontak untuk pertanyaan lebih lanjut menjadi indikator penting dari komitmen LKI terhadap transparansi (Meilani et al., 2025).

Temuan empiris mengenai praktik transparansi di Indonesia menunjukkan adanya variasi antar LKI. Beberapa LKI telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dengan menyajikan laporan keuangan yang komprehensif dan detail, termasuk pengungkapan yang memadai mengenai aspek kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial (Shalhoob, 2025). Laporan keuangan mereka umumnya mudah diakses dan dilengkapi dengan penjelasan yang membantu pemangku kepentingan dalam memahami kinerja dan posisi keuangan LKI. Namun, di sisi lain, terdapat juga LKI yang tingkat pengungkapannya masih terbatas, terutama dalam hal rincian transaksi syariah, mekanisme pengawasan syariah, dan dampak sosial yang dihasilkan. Kualitas informasi yang disajikan juga bervariasi, dengan beberapa LKI menyajikan informasi yang kurang relevan atau tidak disajikan tepat waktu.

Faktor-faktor seperti ukuran LKI, tingkat adopsi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS), dan tekanan regulasi teridentifikasi sebagai pendorong praktik transparansi yang lebih baik. LKI yang lebih besar dan tunduk pada pengawasan yang lebih ketat cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi. Selain itu, pemahaman dan implementasi SAK Syariah yang konsisten juga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan komparabilitas informasi. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam akuntansi syariah dan interpretasi yang berbeda terhadap prinsip-prinsip syariah masih menjadi kendala dalam

mencapai tingkat transparansi yang optimal di seluruh industri keuangan syariah Indonesia (Karaman et al., 2025).

4. Praktik Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia.

Analisis praktik akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia berfokus pada bagaimana menunjukkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingannya melalui informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap mekanisme pertanggungjawaban yang diungkapkan, penjelasan manajemen atas kinerja keuangan dan kepatuhan syariah, serta responsivitas LKI terhadap kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Akuntabilitas dalam konteks syariah tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban finansial, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban etis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Jumaizi, 2024).

Salah satu aspek penting dalam praktik akuntabilitas adalah sejauh mana manajemen LKI memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kinerja keuangan yang telah dicapai dan bagaimana kinerja tersebut selaras dengan tujuan dan prinsip syariah. Laporan manajemen atau surat direksi dalam laporan keuangan seringkali menjadi wadah untuk menyampaikan informasi ini. Analisis akan menelaah apakah penjelasan tersebut mencakup analisis varians antara kinerja aktual dan target, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Selain itu, penjelasan mengenai bagaimana LKI memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, termasuk peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), menjadi indikator penting dari akuntabilitas syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan akuntabilitas syariah tercermin dalam laporan keuangan melalui laporan dan opini mereka. Opini DPS memberikan keyakinan independen kepada pemangku kepentingan bahwa operasional dan produk LKI telah sesuai dengan ketentuan syariah. Analisis akan mengevaluasi tingkat ketegasan dan detail opini DPS, serta independensi dan kualifikasi anggota DPS. Keberadaan mekanisme audit syariah yang efektif dan diungkapkan dalam laporan keuangan juga menunjukkan komitmen LKI terhadap akuntabilitas syariah. Selain itu, responsivitas LKI terhadap harapan dan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan menjadi aspek penting dalam praktik akuntabilitas. Hal ini dapat tercermin dalam penyediaan informasi tambahan yang diminta oleh pemangku kepentingan, penyelenggaraan pertemuan atau forum komunikasi, serta mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan (Rahman, 2024).

Praktik akuntabilitas di LKI Indonesia menunjukkan variasi. Beberapa LKI telah mengadopsi praktik yang baik dengan menyajikan laporan manajemen yang informatif, opini DPS yang jelas dan tegas, serta mekanisme responsif terhadap pemangku kepentingan. Namun, terdapat juga LKI yang masih terbatas dalam memberikan penjelasan yang mendalam mengenai kinerja dan kepatuhan syariah, serta kurang proaktif dalam melibatkan pemangku kepentingan. Faktor-faktor seperti budaya organisasi, komitmen manajemen terhadap prinsip syariah, dan tekanan dari pemangku kepentingan mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pelaporan keuangan LKI.

Peningkatan akuntabilitas memerlukan adanya kesadaran yang kuat dari manajemen, dukungan dari regulasi yang memadai, serta partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dalam menyampaikan harapan dan kebutuhan informasi mereka.

Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah juga tercermin dalam pengungkapan terkait pengelolaan dana-dana khusus seperti dana zakat dan dana kebajikan. Laporan mengenai sumber, penggunaan, dan penyaluran dana-dana ini menunjukkan pertanggungjawaban LKI dalam menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi dalam pengelolaan dana ini, termasuk kriteria penerima dan mekanisme penyalurannya, menjadi krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran sosial LKI. Selain itu, mekanisme tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang diungkapkan dalam laporan keuangan juga berkontribusi pada praktik akuntabilitas LKI. Informasi mengenai struktur dewan komisaris dan dewan pengawas syariah, proses pengambilan keputusan, mekanisme pengendalian internal, serta kebijakan etika dan benturan kepentingan memberikan gambaran mengenai bagaimana LKI dikelola dan dipertanggungjawabkan. Pengungkapan yang komprehensif mengenai aspek-aspek tata kelola ini meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan bahwa LKI dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rahman, 2024).

Pada konteks akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia, penting untuk menyoroti peran informasi teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan kemajuan teknologi, LKI dapat memanfaatkan sistem informasi yang canggih untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Penggunaan platform digital untuk menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga memungkinkan interaksi yang lebih baik antara LKI dan masyarakat. Misalnya, portal online yang menyediakan akses mudah ke laporan keuangan, informasi tentang produk syariah, dan mekanisme pengaduan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas LKI.

Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di LKI juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan praktik akuntabilitas. Manajemen yang memahami prinsip-prinsip syariah dan akuntabilitas keuangan akan lebih mampu menyusun laporan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Investasi dalam pelatihan dan pendidikan bagi karyawan, terutama di bidang akuntansi syariah dan manajemen risiko, sangatlah penting. Sehingga meningkatnya kompetensi sumber daya manusia maka LKI dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan prinsip syariah yang dipegang teguh.

Klaborasi antara LKI dan lembaga pengawas serta regulator juga sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Kerjasama ini dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih baik untuk pengawasan dan evaluasi praktik akuntabilitas di LKI. Dengan adanya peraturan yang jelas dan dukungan dari lembaga pengawas, LKI dapat dengan mudah memenuhi tuntutan akuntabilitas yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, umpan balik dari regulator dapat membantu LKI dalam mengidentifikasi area

yang perlu diperbaiki dan mengembangkan praktik yang lebih baik dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan syariah

5. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan LKI di Indonesia.**

Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang signifikan meliputi karakteristik perusahaan seperti ukuran LKI, usia operasional, dan struktur kepemilikan. LKI yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengadopsi praktik pelaporan yang lebih komprehensif dan transparan. Struktur kepemilikan, seperti kepemilikan oleh pemerintah atau investor institusional, juga dapat memberikan tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kualitas tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang kuat, termasuk keberadaan komite audit yang efektif dan dewan pengawas syariah yang independen dan kompeten, secara positif berkorelasi dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas pelaporan (Nur, 2024).

Faktor eksternal yang berperan penting meliputi tekanan regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (untuk bank syariah). Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif mendorong LKI untuk mematuhi standar pelaporan yang lebih tinggi. Persaingan dalam industri keuangan syariah juga dapat menjadi pendorong transparansi dan akuntabilitas. LKI yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif mungkin merasa perlu untuk meningkatkan kualitas pelaporan mereka guna menarik investor dan depositan. Lebih lanjut, tuntutan dan harapan dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, depositan, analis keuangan, dan masyarakat umum, turut mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas. LKI yang responsif terhadap kebutuhan informasi pemangku kepentingan cenderung menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dan akuntabel.

Selain faktor-faktor tersebut, kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yang dimiliki LKI juga memainkan peran krusial. Ketersediaan staf akuntansi yang kompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah serta sistem informasi akuntansi yang canggih dan terintegrasi akan memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Melalui budaya organisasi dan komitmen manajemen terhadap prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis juga menjadi faktor penentu. Organisasi dengan budaya yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab cenderung memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas pelaporan yang lebih baik. Interaksi kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal inilah yang membentuk lanskap praktik transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan LKI di Indonesia.

Adopsi dan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) secara konsisten dan komprehensif merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas. Kualitas interpretasi dan penerapan SAK Syariah oleh manajemen LKI akan menentukan sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan dalam pemahaman dan

implementasi standar dapat menyebabkan variasi dalam praktik pelaporan antar LKI, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat komparabilitas dan transparansi secara keseluruhan. Sehingga upaya sosialisasi, pelatihan, dan penegakan kepatuhan terhadap SAK Syariah menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, faktor-faktor kontekstual seperti tingkat perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia dan tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pemangku kepentingan juga turut berperan. Pasar keuangan syariah yang semakin matang dan sophisticated cenderung menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari LKI. Maka para pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah akan lebih mampu mengevaluasi kualitas pelaporan dan menuntut akuntabilitas yang lebih besar (Amaliah & Sentiana, 2025).

Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap transparansi dan akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia, penting untuk menyoroti peran budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai transparansi, integritas, dan akuntabilitas akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk berkomitmen pada praktik pelaporan yang baik. Ketika manajemen dan karyawan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya akuntabilitas, sehingga cenderung lebih proaktif dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan informatif. Selain itu, budaya yang mendorong komunikasi terbuka dan umpan balik dari pemangku kepentingan juga dapat meningkatkan kualitas laporan, karena LKI akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan (Prasetyo, 2024).

Selain melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi staf akuntansi dan manajemen juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah dan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan, LKI dapat memastikan bahwa staf yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun laporan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, pelatihan ini juga dapat mencakup aspek etika bisnis dan kepatuhan syariah, sehingga staf tidak hanya memahami angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga konteks moral dan etika di baliknya. Sehingga investasi dalam pengembangan sumber daya manusia akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan, pada gilirannya, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Mempertimbangkan dampak informasi teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKI. Dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang canggih dan terintegrasi, LKI dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Teknologi juga memungkinkan LKI untuk menyediakan akses yang lebih baik kepada pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan, sehingga dapat melakukan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja LKI. Selain itu, penggunaan platform digital untuk komunikasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan dapat meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab LKI terhadap kebutuhan informasi (Raju, 2022).

Peran lembaga pengawas dan regulator dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKI tidak dapat diabaikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menetapkan regulasi yang jelas dan memastikan bahwa LKI mematuhi standar pelaporan yang ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, LKI akan lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Regulator juga dapat memberikan pedoman dan dukungan teknis kepada LKI dalam menerapkan praktik terbaik dalam akuntabilitas. Selain itu, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dapat berfungsi sebagai pendorong bagi LKI untuk lebih patuh terhadap regulasi dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan.

Kolaborasi antara LKI dan lembaga penelitian atau akademisi juga dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Melalui penelitian dan kajian yang dilakukan oleh akademisi, LKI dapat memperoleh wawasan dan rekomendasi yang berharga mengenai praktik terbaik dalam pelaporan keuangan dan akuntabilitas. Kerjasama ini dapat menciptakan forum diskusi yang memungkinkan LKI untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam praktik akuntabilitas.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam keuangan syariah yang melandasi etika operasional dan pelaporan LKI. Transparansi memastikan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu, sementara akuntabilitas menekankan kewajiban LKI untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Kedua prinsip ini esensial untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata seluruh pemangku kepentingan.
2. Pelaporan keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pelaporan konvensional, dengan implikasi signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan khusus terkait kepatuhan syariah, pengelolaan dana zakat dan kebajikan, serta penggunaan akad-akad syariah menuntut tingkat transparansi yang lebih luas. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) berperan penting dalam memfasilitasi hal ini, meskipun tantangan harmonisasi dan interpretasi masih perlu diatasi.
3. Praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan LKI di Indonesia menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Ukuran LKI, tata kelola perusahaan, adopsi SAK Syariah, tekanan regulasi, tuntutan pemangku kepentingan, kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi merupakan faktor-faktor yang berperan dalam menentukan tingkat pengungkapan dan pertanggungjawaban LKI.
4. Persepsi dan harapan pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan LKI menjadi penting untuk dievaluasi. Pemahaman mengenai kebutuhan informasi dari deposan, investor, dan masyarakat umum dapat membantu

mengidentifikasi kesenjangan antara informasi yang disajikan dan yang dibutuhkan, sehingga mendorong LKI untuk meningkatkan kualitas pelaporan mereka.

5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah memiliki implikasi positif terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan pertumbuhan sektor keuangan Islam di Indonesia. Pelaporan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan reputasi LKI, menarik lebih banyak investor dan deposan, serta berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan praktik pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Implementasi SAK Syariah: Perlu adanya upaya berkelanjutan dalam sosialisasi, pelatihan, dan penegakan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) di seluruh LKI. Hal ini bertujuan untuk mengurangi variasi dalam interpretasi dan implementasi standar, sehingga meningkatkan komparabilitas dan kualitas informasi yang disajikan. Otoritas terkait dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memastikan implementasi yang konsisten.
2. Penguatan Mekanisme Pengawasan Syariah dan Tata Kelola: Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diperkuat melalui peningkatan independensi, kompetensi anggota, dan kejelasan mandat. Opini DPS dalam laporan keuangan hendaknya lebih detail dan tegas dalam memberikan keyakinan atas kepatuhan syariah. Selain itu, praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang selaras dengan prinsip syariah perlu terus ditingkatkan dan diungkapkan secara transparan.
3. Peningkatan Pengungkapan Informasi Non-Keuangan: LKI perlu meningkatkan pengungkapan informasi non-keuangan yang relevan dengan prinsip syariah, seperti rincian pengelolaan dana zakat dan kebajikan, dampak sosial dan lingkungan, serta praktik tata kelola syariah. Pengungkapan ini penting untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan yang semakin meningkat terhadap tanggung jawab sosial dan etika LKI.
4. Peningkatan Responsivitas terhadap Kebutuhan Pemangku Kepentingan: LKI perlu lebih proaktif dalam memahami dan merespons kebutuhan informasi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, forum komunikasi, atau mekanisme umpan balik lainnya. Penyediaan informasi tambahan yang relevan dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.
5. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah

dan pemahaman prinsip syariah perlu ditingkatkan. Pelatihan dan sertifikasi profesional di bidang keuangan syariah dapat membantu meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya artikel ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Fadly Yashari Soumena, S.E., M.Si. Atas bimbingan, arahan, motivasi, dan kesabaran Bapak yang tak ternilai selama proses penyusunan jurnal ini, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Ilmu dan nasihat yang Bapak berikan telah menjadi pilar utama dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Bapak.

6. REFERENSI

- Aamer, B. (2024). Fabrication Of Fiqh Doctrines And Its Impact On Financial Transaction Contracts (A Study On Samples Of Sharia Standards Issued By The Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions Aaoifi). *Journal Of Umm Al-Qura University For Sharia'h Sciences And Islamic Studies*.
- Amaliah, E., & Sentiana, F. (2025). Sharia Financial Literacy And Inclusion In Advancing The Green Economy. *Raden Intan: Proceedings On Family And Humanity*.
- Amjadallah A, A., Khanifah, & Nuranisya, G. H. (2023). Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren. *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam*, 2(01), 13–27.
- Annas, F. A., & Others. (2021). *Tingkat Pengungkapan Manajemen Risiko Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta.
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 23–37.
- Calandra, D., Lanzalonga, F., & Biancone, P. (2024). Exploring Ifrs In Islamic Finance: A Bibliometric And Coding Analysis Of Emerging Topics And Perspectives. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*.
- Damayanti, A. R., Aluf, S., Yunus, N. A., Rahman, M. F. F., Rukmana, D. S., & Others. (2023). Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen. *Journal Of Creative Student Research*, 1(4), 1–21.
- Dan Yanting Xu Dan Ziqing Du, Z. L. (2025). Valuing Data Keuangan: Kasus Perkiraan Analis. *Finance Research Letters*.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models In Preparing Financial Statements. *Jaamter: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10.
- Jaradat, H., & Oudat, M. S. (2025). Enhancing Clarity And Transparency In Islamic Financial Practices: The Role Of Regulatory Influence. *Journal Of Financial Reporting And Accounting*.

- Jumaizi, J. (2024). *Peran Al-Adl Financing Risk Management: Upaya Peningkatan Mudharabah Financing Performance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kamaruzaman, N. R., & Ishak, M. S. I. (2023). Waqf Institutions: A Systematic Literature Review On Governance, Financial Models, And Socio-Economic Impact In Islamic Social Finance. *Advanced International Journal Of Business, Entrepreneurship And Smes*.
- Karaman, A. S., Viana, F. L. E., Ellili, N., & Uyar, A. (2025). The Environmental Committee: Corruption, Accountability And Sustainable Supply Chain Transparency. *Management Decision*.
- Kim, L., & Grauer, J. N. (2024). Revisiting The Consistency Of Financial Disclosure Reporting By Authors At Annual Spine Conferences Show Inconsistent Improvements After 14 Years. *Clinical Spine Surgery*.
- Kismawadi, E. R., & Irfan, M. (2025). Business Transformation Towards Sustainability: Integration Of Islamic Finance Principles In The Global Business Context. In *Microfinance, Financial Innovation, And Sustainable Entrepreneurship In Economics* (Pp. 255–290). Igi Global Scientific Publishing.
- Meilani, M. N., Drajat, A. Z., Andaresta, T., Prayoga, M. A. K., Armayza, M. A., & Kurniati, F. (2025). Analysis Of The Implementation Of Financial Accounting Standards (Sak Emkm) In Scarveil Msme Financial Reports. *Jurnal Bina Akuntansi*.
- Nur, A. W. (2024). *Faktor--Faktor Volatilitas Makroekonomi Dan Kondisi Internal Perbankan Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2019--2023*. Uin Raden Intan Lampung.
- Prasetyo, H. D. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 2(6), 369–373.
- Rahman, Y. R. (2024). *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah*. Iain Parepare.
- Raju, A. F. (2022). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Baznas Kota Makassar)*.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2024). Enhancing Taxpayer Compliance Through Fiscal Transparency, Participation And Accountability: Insights From Key Figures Of Islamic Boarding Schools In Depok City. *Isra International Journal Of Islamic Finance*, 16(2), 20–44.
- Saputri, D. R., Pujiningsih, S., & Utami, H. (2024). Determinants Of Transparency Of Local Government Financial Reports In Indonesia. *Oblik I Finansii*, 3(105), 120–131.
- Shalhoob, H. (2025). The Role Of Ai In Enhancing Shariah Compliance: Efficiency And Transparency In Islamic Finance. *Journal Of Infrastructure, Policy And Development*.
- Simsek, R., Mollah, S., & Tunyi, A. A. (2024). Corporate Governance Structure And Climate-Related Financial Disclosure: Conventional Banks Versus Islamic Banks. *Business Strategy And The Environment*.
- Sudarmi, S., Masse, R. A., & Sapa, N. Bin. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ekoma: Jurnal Ekonomi*,

Manajemen, Akuntansi, 3(4), 1570–1579.

Ye, X., Gao, T., Zhang, M., & Zheng, Z. (2025). Concealment And Detection: The Influence Of Management Tone On Analyst Forecast Revisions. *International Review Of Financial Analysis*.